

# Analysis of The Implementation of Government Accounting Standards in the Preparation of Operational Reports to the Government of BPKD Bengkulu Province

## Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyusunan Laporan Operasional pada Pemerintah BPKD Provinsi Bengkulu

Arnita Anggraini <sup>1)</sup>; Oni Yulianti <sup>2)</sup>; Herlin <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Study Program of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

<sup>2)</sup> Department of Accounting, Faculty of Economic, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [arnita.anggraini18@gmail.com](mailto:arnita.anggraini18@gmail.com)

### How to Cite :

Anggraini, A., Yulianti, O., Herlin. (2021). Analysis of The Implementation of Government Accounting Standards in the Preparation of Operational Reports to the Government of BPKD Bengkulu Province. JURNAL EMBA REVIEW, 1(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v1i2>

### ARTICLE HISTORY

Received [12 Oktober 2021]

Revised [19 Oktober 2021]

Accepted [10 November 2021]

### KEYWORDS

Income - LO, Expenses - L

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penyusunan Laporan Operasional Pada Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional Berbasis akrual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan Laporan Operasional Pada Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional Berbasis Akrual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama dibidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penelitian ini dilakukan Pada Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu. Data dalam penelitian ini yaitu data dokumen dan wawancara. Data tersebut diperoleh dari Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu berupa Laporan Operasional untuk tahun anggaran 2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu metode yang menggambarkan terlebih dahulu mengenai pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan dan beban pada Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu yang kemudian disesuaikan dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional Berbasis Akrual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Operasional Pada Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan PSAP No. 12. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan dan beban dalam penyusunan Laporan Operasional telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang berbasis akrual.

### ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the preparation of the Operational Report on the Government of the Regional Financial Management Agency of Bengkulu Province with PSAP No. 12 concerning

*Accrual-Based Operational Reports. The results of this study are expected to provide input, especially in the field of public sector accounting related to Accrual-Based Government Accounting Standards. This research was conducted at the Bengkulu Provincial Government Financial Management Agency. The data in this study are document and interview data. The data was obtained from the Bengkulu Provincial Financial Management Agency Government in the form of an Operational Report for the 2020 fiscal year. The data analysis technique used was a qualitative analysis method, which is a method that describes in advance the recording, recognition, and reporting of income and expenses to the Government of the Financial Management Agency. Bengkulu Province which was then adjusted to PSAP No.12 concerning Accrual-Based Operational Reports. The results showed that the preparation of the Operational Report on the Government of the Bengkulu Province Regional Financial Management Agency was in accordance with PSAP No. 12. This can be seen from the recording, recognition, and reporting of income and expenses in the preparation of the Operational Report in accordance with PSAP No. 12 concerning accrual-based Operational Reports.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di sektor pemerintahan pusat maupun di sektor daerah menunjukkan bahwa meningkatnya perkembangan sector public di Indonesia Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini (Alamanto, 2017:1).

Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dibidang pemerintahan, termasuk dibidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya.oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan kelembagaan agar mampu mengembangkan perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel (Alamanto, 2017:1).

Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendahraan Negara disebutkan bahwa SAP ditetapkan dalam peraturan Pemerintah yang diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010 salah satu ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual, dimana basis kas dan tidak mencatat asset dan kewajiban, sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat asset dan kewajiban (Usman, 2014).

Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaran pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan ini, menggunakan Basis Cash Toward Accrual (Kas Menuju Akrual), dimana Laporan Realisasi Anggaran yang berisi pendapatan dan belanja disajikan dengan basis kas, sedangkan laporan neraca yang berisi aset, ekuitas dana dan kewajiban disusun dengan menggunakan basis akrual. Penggunaan basis kas menuju akrual ini hanya berlaku sampai pada pertanggung jawaban untuk tahun anggaran 2020.

Pemerintah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruial yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 selaku pengganti/ penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Akuntansi Berbasis Akruial merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas/ setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam peraturan ini, bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas penggunaan anggaran selama periode tertentu disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporanann Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi (Maya, 2019:2).

Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tahun 2010, menyatakan bahwa SAP dijelaskan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Maya, 2019:1).

Akuntansi Berbasis Akruial merupakan suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya suatu entitas. Dalam akuntansi berbasis akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban.

Laporan Operasional merupakan menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun- akun luar biasa (Made, 2016:3).

Tanpa adanya standar umum ini, maka laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah bisa jadi berbeda-beda antar daerah yang pada gilirannya akan memunculkan persoalan-persoalan baru pada level nasional. Oleh karena itu, pentingnya SAP maka setiap penyusunan laporan operasional tidak terlepas dari faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya berupa infrastruktur, karena membantu dalam penyusunan laporan operasional daerah. Namun dalam penyusunan laporan operasional daerah, pemerintah Kota Bengkulu masih mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah yang menyebabkan penyusunan laporan operasional berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, masalah

ketidak seimbangan antara pendapatan dan belanja daerah di sebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menentukan pos-pos pendapatan strategi berdasarkan potensi keunggulan yang dimiliki oleh daerah serta ketidakmampuan dalam memprioritaskan pembelanjaan daerah sehingga hal itu kemudian yang perlu dibenahi dan dicarikan solusi yang sesuai dengan permasalahan tersebut

## LANDASAN TEORI

### Akuntansi Sektor Publik.

Haryanto, dkk. (2017: 1) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Menurut Bastian (2014: 2) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

### Laporan Keuangan Pemerintah

Definisi laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri merupakan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

### Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Ratmono (2015:12) Meskipun ada dua basis akuntansi yaitu kas (LRA) dan akrual (LO dan Neraca), namun hanya satu persamaan akuntansi yang digunakan. Karena unsur ekuitas terbentuk dari transaksi kas (realisasi anggaran) dan transaksi yang bersifat akrual. Sehingga persamaan yang digunakan untuk dasar pencatatan adalah  $Aset = Kewajiban + Ekuitas + (Pendapatan - LO - Beban)$  Persamaan akuntansi ini digunakan dalam basis akrual akan menghasilkan laporan operasional.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah berupa kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Pada penelitian kualitatif, penelitian terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Penelitian diharapkan selalu memfokuskan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Karakteristik masalah penelitian kualitatif di antaranya adalah segala Sesutu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas atau belum pasti masalahnya, sumber datanya dan hasil diharapkan semua belum jelas (masih dapat dirubah sesuai dinamika di lapangan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan metode kualitatif yaitu Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi,

tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif menurut Sudaryono (2017: 91) menyatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atas interpretasi dari individu (informan) dalam latar alamiah.

**Tabel. 1 Hasil Perbandingan Penyusunan Laporan Operasional pada Pemerintah BPKD Provinsi Bengkulu dengan PSAP No. 12 tahun 2010**

No	PSAP No. 12 tahun 2010	Laporan Operasional BPKD	Keterangan sesuai/tidak sesuai
1	Tujuan : Memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan	Menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	Sesuai. Karena laporan operasional harus memenuhi tujuan yang dimana tujuan tersebut ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2	Ruang Lingkup : Pernyataan standar ini ditetapkan dalam penyajian laporan operasional	Pemerintah daerah harus menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan, beban dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu.	Sesuai. Karena penyajian laporan operasional berlaku untuk setiap pelaporan baik dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahn daerah
3	Manfaat informasi laporan operasional : Pengguna laporan operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit.	Laporan operasional disajikan untuk pelaporan yang terdapat surplus/defisit operasional	Sesuai. Karena dilampiran laporan operasional yang tercerminkan informasi dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan periode sebelumnya
4.	Periode pelaporan : Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.	Laporan Operasional disajikan sekali dalam setahun	Sesuai. Karena melihat dari lampiran laporan operasional Pada BPKD Provinsi Bengkulu yang dimana berakhir di Bulan Desember.
5.	Struktur dan isi laporan operasional : Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, pos luar biasa, dan surplus/defisit bersih, yang diperlukan untuk menyajikan yang secara komparatif.	Struktur dan isi laporan operasional : Laporan Operasional menyajikan berbagai Unsur pendapatan beban, surplus/defisit operasi, pos luar biasa, dan surplus/defisit bersih,	Sesuai. Karena didalam lampiran laporan operasional Pada BPKD Provinsi Bengkulu terdapat struktur dan isi Unsur pendapatan beban, surplus/defisit dari operasi, pos luar biasa, dan surplus/defisit bersih,
6.	Informasi yang disajikan dalam laporan operasional atau dalam catatan atas laporan keuangan : Entitas pelaporan menyajikan pendapatan yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.	Laporan operasional disajikan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan	Sesuai. Karena Entitas pelaporan menyajikan Pendapatan yang berdasarkan klasifikasi basis akun standar yang dipersyaratkan ketentuan perundangan yang berlaku.

7.	Akuntansi pendapatan-LO : Pendapatan LO diakui pada saat : a. Pendapatan diperoleh b. pendapatan direalisasi	Pendapatan LO diakui pada saat terjadinya pendapatan diperoleh dan pendapatan direalisasi	Sesuai. Karena dalam dilampiran laporan operasional Pada Pemerintah BPKD Provinsi Bengkulu terdapat kolom pendapatan-LO yang memiliki beberapa pendapatan yaitu : pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO
8.	Akuntansi beban : Beban diakui pada saat: a. timbulnya kewajiban b. terjadinya konsumsi asset c. terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau pontensi jasa	Pengakuan beban dan terjadinya asset serta penurunan ditimbulkan adanya yaitu : 1. saat timbulnya kewajiban 2. saat terjadinya konsumen asset 3. saat terjadinya penurunan manfaat ekonomis	Sesuai. Karena didalam lampiran laporan operasional Pada Pemerintah BPKD Provinsi Bengkulu bahwa akuntansi beban berdasarkan klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban seperti beban pengawai, beban barang dan jasa, beban bunga dan lain-lainnya.
9	Transaksi dalam mata uang asing : Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah	Harus dibukukan dalam mata uang rupiah	Sesuai. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkan Kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank pada tanggal transaksi
10	Surplus/defisit-LO : Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa	Dalam surplus/defisit-LO terdapat Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa	Sesuai. Karena didalam lampiran laporan operasional pada BPKD Provinsi Bengkulu terdapat selisih surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa
11	Surplus/defisit dari kegiatan operasional : Selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan	Didalam kegiatan operasional terdapat surplus/defisit yang dimana Selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan	Sesuai. Karena didalam lampiran laporan operasional pada BPKD Provinsi Bengkulu terdapat laporan keuangan pendapan dan beban.
12	Surplus/defisit dari kegiatan non operasional : Pendapatan dan beban yang bersifat tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional	Didalam laporan operasional tidak terdapat transaksi	Sesuai. Karena didalam lampiran laporan operasional pada BPKD Provinsi Bengkulu terdapat kegiatan non operasional tetapi tidak memiliki transaksi karena pemerintah tidak menjual asset.

13.	Pos luar biasa : disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.	.pos luar biasa ini yang dimana disajikan terpisah baik dari pos-pos lainnya dalam operasional dan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional yang dimana pos luar biasa merupakan sebelum surplus/defisit	Sesuai. Karena didalam lampiran laporan operasional pada BPKD Provinsi Bengkulu pendapatan luar biasa-LO dikurang beban luar biasa yang Digunakan untuk keperluan kejadian diluar tahun anggaran awal.
-----	--	---	---

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2020 telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan - LO dan beban - LO pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu yang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. 78

### Saran

1. Hendaknya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu mempertahankan prestasi yang telah diraih atau bahkan terus ditingkatkan lagi supaya terus tercipta tata kelola dengan baik terutama dibidang akuntansi sector public dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan agar dalam pemeriksaan serta pengawasan dapat berjalan dengan baik.
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu sebaiknya memberi bimbingan, pelatihan dan bersosialisasi sehubungan dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamanto, 2017. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang. Tesis tidak diterbitkan. Makassar Program Ekonomi Universitas Muhammadiyah.
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu
- Bastian, Indra. 2014. Audit Sektor Publik, Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan: Aksara.
- Haryanto, dkk. 2017. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Made, 2016. September, Laporan Operasional. Makalah disajikan dalam lokakarya Penulisan Pedoman Skripsi dan Laporan Akhir Di Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
- Maya, 2019. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta Program Ekonomi Universitas Sanata Dharma
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Off
- Nur, 2018. Penerapan standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar. Tesis tidak diterbitkan. Makassar Program Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah



- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
- Ratmono, Dwi. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Robbins, Stephen P dan Timothy A Judge. 2014. Perilaku Organisasi. Jakarta: Selempang Empat
- Silvia, 2019. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Tesis tidak diterbitkan. Bengkulu Program Ekonomi Universitas Dehasen
- Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pernyataan No. 12 Laporan Operasional
- Sudaryono. 2017. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta
- Usman, 2014. System Akuntansi. Bandung
- Vivi, 2019. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Bapelitbang Kota Bengkulu. Tesis tidak diterbitkan. Bengkulu Program Ekonomi Universitas Dehasen
- <https://bpkd.bengkuluprov.go.id/>